



TAJUK RENCANA

Bergandengan Tangan untuk Indonesia

Kesempatan kedua untuk mendunia itu akhirnya datang juga. FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 setelah Peru mengundurkan diri.

Peru mengundurkan diri, April lalu, karena tak bisa memenuhi komitmen kepada Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA), selain gegara gangguan cuaca buruk. Turnamen dua tahunan itu akan digelar pada 10 November-2 Desember 2023. Namun, Indonesia juga tak mudah mendapatkan peluang itu karena sebelumnya dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Negara ini batal menjadi tuan rumah turnamen sepak bola dunia karena alasan yang terkait sikap politik.

Lupakan kegaduhan dan kekecewaan atas kegagalan negeri kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan kabar melegakan itu, Sabtu (24/6/2023), setelah sehari sebelumnya FIFA menggelar sidang.

Peluang untuk menggantikan Peru, sekalipun tidak mudah, sebenarnya terlihat terang saat FIFA tidak menghukum keras Indonesia yang urung menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Bahkan, FIFA memberikan kesempatan kepada PSSI mentransformasikan sepak bola nasional, serta menggelar dua pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia dan tim nasional Palestina dan Argentina. Sebanyak 22 stadion di daerah kini sedang direnovasi pula.

Setelah adanya kepastian dari FIFA, Erick pun mengatakan, "Untuk bisa menyaksikan event yang sangat berharga ini, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang besar dan bersatu." Dia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersepakat dan konsekuen mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Apalagi, Israel tidak menjadi salah satu negara peserta (*Kompas*, 25/6/2023).

Sampai saat ini sudah 20 negara, termasuk Indonesia, dipastikan menjadi peserta Piala Dunia U-17. Masih ada empat tempat lagi, yang kini dipersebutkan oleh delapan negara Asia. Mayoritas peserta, termasuk yang masih menjalani seleksi di tingkat kawasan, adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Nusantara.

Menurut Presiden Joko Widodo, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17, yang bermakna juga kesempatan bagi tim nasional berlaga di kejuaraan sepak bola dunia, tidak hanya layak disyukuri, tetapi juga perlu dijawab dengan sungguh-sungguh. Kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA, haruslah disambut dengan persiapan yang betul-betul. Ketua PSSI sudah diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk lapangan untuk bertanding sebaik-baiknya.

Tentu PSSI dan pemerintah tak bisa sendiri menyiapkan pergelaran besar itu. Dukungan dari rakyat tak bisa ditinggalkan sebab 24 tim yang berlaga pada kejuaraan yang menjadi sumber pesepak bola dunia itu akan disebarkan di beberapa daerah. Tidak semua pertandingan di Jakarta atau sekitarnya. Sebagai tuan rumah, kita perlu bergandengan tangan kembali, merajut kebersamaan, supaya tamu calon bintang itu nyaman berlaga. Syukur-syukur Indonesia bisa menang pula.

Teka-teki soal Relasi Putin-Prigozhin

Sejumlah teka-teki masih menyelimuti peristiwa pemberontakan kelompok Wagner di Rusia. Salah satunya, kelanjutan hubungan Vladimir Putin-Yevgeny Prigozhin.

Jika dibandingkan dengan pemberontakan besar di Rusia sebelumnya, yang dialami pendahulu Presiden Vladimir Putin, yakni Mikhail Gorbachev (Agustus 1991) dan Boris Yeltsin (September-Oktober 1993), pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner pimpinan Prigozhin berlangsung sangat singkat. Hanya sekitar 24 jam.

Tak ada setetes darah pun tumpah. Ada pendudukan markas militer di kota Rostov-on-Don, sekitar 1.000 kilometer selatan Moskwa. Sempat ada konvoi menuju Ibu Kota. Namun, drama pemberontakan sejak Jumat (23/6/2023) itu berakhir anti-klimaks dalam putaran tak kalah dramatisnya.

Lewat mediasi Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Prigozhin menghentikan pemberontakannya dan bersedia ke Belarus. Kompensasinya, ia dan pasukannya yang memberontak akan dibebaskan dari hukuman.

Pengamat berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi, mulai dari isu keretakan di lingkungan kekuasaan Putin, persaingan internal militer Rusia, hingga isu bernada konspiratif.

Informasi di media arus utama atau media sosial berseliweran, tak jarang bertentangan satu sama lain, menambah kepekat kabut misteri di Rusia. Di kalangan pemerhati Rusia, hal itu tak mengherankan, apalagi menyentuh militer.

Militer Rusia mempunyai tradisi memastikan dunia luar boleh tahu sesedikit mungkin mengenai aktivitasnya, tulis Andrei Soldatov dan Irina Borogan, pendiri dan editor *Agentura.ru*, pemantau aktivitas badan-badan rahasia Rusia, dalam jurnal *Foreign Affairs*, 12 Mei 2023. Menteri Pertahanan Sergey Shoigu, misalnya, baru muncul di depan publik melalui tayangan video yang disiarkan televisi pemerintah hari Senin (26/6), di tengah spekulasi ia dan sejumlah petinggi militer lain kehilangan kepercayaan dari Putin.

Selain itu, belum diketahui secara pasti posisi Prigozhin. Kantor berita Rusia, RIA Novosti dan Interfax, dengan mengutip sumber di Kejaksaan Umum, memberitakan dakwaan pidana terhadap Prigozhin belum ditutup. Dengan sejumlah teka-teki dan misteri yang menyelimuti peristiwa di Rusia, saat ini terlalu dini untuk mengambil kesimpulan dan memperkirakan arah perkembangan ke depan.

Di tengah kegelapan itu, perhatian banyak ditujukan pada hubungan antara Putin dan Prigozhin. Dua sosok kelahiran kota yang sama, Leningrad (sekarang St Petersburg), ini dua sahabat sejak lama. Sebelum mendapat kontrak perang dengan bendera Wagner atas nama Rusia, Prigozhin dijuluki "juru masak"-nya Putin berkat bisnis boganya yang kerap mendapat kontrak penyediaan makanan di kantor pemerintah.

Berkat pasukan Prigozhin, Putin memetik berbagai kemenangan pertempuran di sejumlah negara, termasuk di Ukraina. Namun, saat perang di Ukraina sudah 1,5 tahun tanpa diketahui kapan akan berakhir, apakah kolaborasi keduanya benar-benar berakhir atau akan mengambil bentuk lain?

KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum: Lilik Deltama
Wakil Pemimpin Umum: Budiman Tanurejdo
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Sutta Dharmasaputra
Wakil Pemimpin Redaksi: P. Tri Agung Kristanto
Redaktur Senior: Ninok Leksono, Rikard Bagun, Ninuk Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana: Adi Prinanto
Wakil Redaktur Pelaksana: Marcellus Hernowo, Antonius Tommy Trinugroho, Hanyo Damardono, Andreas Maryoto
Sekretaris Redaksi: Subur Tjahjono, Gesit Ariyanto

Sisa Waktu Bonus Demografi

Sonny Harry B Harmadi

Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Pengajar Ekonomi dan Demografi di ITS

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengingatkan pentingnya sisa waktu 13 tahun bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara maju.

Apa yang diungkapkan Presiden Jokowi erat kaitannya dengan periode bonus demografi di Indonesia yang tersisa 13 tahun lagi.

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 berbasis data Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2015, periode bonus demografi di Indonesia berlangsung 2012 hingga 2036.

Mengapa begitu penting periode bonus demografi? Karena negara yang berada dalam periode bonus demografi memiliki penduduk usia produktif berlimpah, ditandai oleh rasio ketergantungan di bawah 50, dan berkesempatan meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi modal penting bagi kita untuk menjadi negara maju.

Bank Dunia membagi perekonomian dunia menjadi empat kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah, menengah bawah, menengah atas, dan tinggi. Pendapatan mengacu pada pendapatan nasional bruto/PNB (*gross national income/GNI*) per kapita, menggunakan satuan mata uang dollar AS.

Klasifikasi ini diperbarui oleh Bank Dunia setiap tahun sehingga batas pendapatan per kapita terus bergerak naik.

Berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan per kapita Indonesia pada 2011, saat akan memasuki periode bonus demografi, tercatat 2.990 dollar AS. Data terakhir 2021 menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia 4.180 dollar AS. Selama sembilan tahun berada dalam periode bonus demografi, pendapatan per kapita Indonesia naik 1,4 kali lipat.

Jika menggunakan ukuran Bank Dunia tahun 2021, dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia berhasil naik "kelas" dari negara berpendapatan menengah bawah jadi menengah atas. Namun, Indonesia masih di batas bawah negara berpendapatan menengah atas. Cukup jauh untuk bisa naik status menjadi negara berpendapatan tinggi.

Sebagai perbandingan, Korea Selatan (Korsel) mulai memasuki periode bonus demografi sejak 1987, dengan pendapatan per kapita 3.530 dollar AS. Namun, Korsel mampu memanfaatkan periode bonus demografi dengan sangat efektif. Hanya dalam waktu sembilan tahun, pada 1996, Korsel naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita 13.320 dollar AS.

Selama kurun waktu sembilan tahun, pendapatan per kapita di Korsel naik 3,8 kali lipat, sedangkan Indonesia naik 1,4 kali lipat dalam sembilan tahun awal periode bonus demografi.

China memasuki periode bonus demografi tahun 1997 dengan pendapatan per kapita 750 dollar AS, di bawah pendapatan per kapita Indonesia saat itu (1.090 dollar AS). Perlahan namun pasti, China berhasil memanfaatkan periode bonus demografi dengan sangat baik dan sejak 1998 memiliki pendapatan per



kapita di atas Indonesia.

Pada 2021, setelah 24 tahun berada dalam periode bonus demografi, pendapatan per kapita China mencapai 11.880 dollar AS, naik hampir 16 kali lipat sejak memasuki periode bonus demografi. Pada 2021, China sudah mendekati status negara berpendapatan tinggi.

Bonus demografi lebih lama

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pertengahan Mei lalu bersama Kepala Bappenas meluncurkan buku proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050. Perhitungan proyeksi penduduk didasarkan pada data Sensus Penduduk 2020. Hasil proyeksi ini menggantikan data proyeksi penduduk 2015-2045.

Kabar baiknya, berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2050 (skenario tren), bonus demografi di Indonesia akan berakhir pada 2041. Periode bonus demografi lima tahun lebih lama daripada proyeksi sebelumnya (berakhir 2036).

Dengan 18 tahun waktu tersisa, kita harus memanfaatkannya untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) dan menjadi negara maju. Agar terwujud, ada empat alternatif strategi mengoptimalkan sisa waktu bonus demografi.

Pertama, terkait pengendalian angka kelahiran. Tren kelahiran di Indonesia terus menurun. Saat ini, rata-rata jum-

lah anak per perempuan di Indonesia sudah mendekati 2,1 anak. Setelah 2035, jumlah anak per perempuan turun di bawah dua anak, hingga mencapai 1,97 anak per perempuan pada 2045.

Jika dibiarkan, jumlah penduduk Indonesia berpotensi turun di masa depan dan periode bonus demografi dapat berakhir lebih cepat. Strategi pembangunan kependudukan harus mampu menjaga penduduk tumbuh seimbang.

Total fertility rate dua anak per perempuan perlu dipertahankan selama mungkin, tidak dibiarkan turun di bawah dua anak. Jika di masa lalu kita fokus ke penurunan angka kelahiran, di masa depan kita harus mampu menjaga angka kelahiran tetap stabil, tidak turun, tidak naik.

Kedua, terkait peningkatan produktivitas penduduk. Jumlah penduduk Indonesia akan menembus angka 300 juta jiwa pada 2032, bertambah 100 juta jiwa dibandingkan 1998. Pada tahun 2045, penduduk Indonesia mencapai 324 juta jiwa, secara jumlah akan disalip Nigeria dan Pakistan.

Jika setiap individu penduduk meningkatkan produktivitasnya, dengan jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan peningkatan produktivitas agregat yang besar pula. Pendidikan dan pelatihan harus mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mem-

bangun keterampilan dan pengetahuan berorientasi industri. Kita dapat belajar dari Korsel dan China bahwa kunci pemanfaatan bonus demografi ialah peningkatan produktivitas.

Proses industrialisasi harus terus terjadi dengan mendorong industri manufaktur tumbuh. Namun, industri manufaktur tak akan mampu menyerap semua tenaga kerja. Di era disrupsi, industri padat modal akan mendominasi. Oleh karena itu, sektor pertanian dalam arti luas juga harus tumbuh, menyerap tenaga kerja, dengan produktivitas yang tinggi. Pertanian berperan penting bagi ketahanan pangan nasional, pengurangan kemiskinan, dan penyediaan *input* industri manufaktur.

Penduduk menua

Strategi ketiga terkait migrasi penduduk untuk pemerataan manfaat bonus demografi antardaerah. BPS mencatat sejak 1971 hingga 2022 terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat arus migrasi masuk ke Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain di luar Jawa.

Ada perbaikan pemerataan pembangunan nasional. Migrasi dapat memperbaiki distribusi penduduk usia produktif antardaerah. Satu dekade lalu terdapat tujuh provinsi yang belum memasuki periode bonus demografi.

Namun, saat ini tersisa Nusa Tenggara Timur yang belum menikmati era bonus demografi. Tantangannya, kebijakan dan data migrasi penduduk tak sebaik dua komponen demografi lainnya, kelahiran dan kematian.

Hal ini disebabkan tak ada lembaga pemerintah yang menangani migrasi, sementara kelahiran dan kematian masing-masing sudah ditangani BK-KBN dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah perlu menetapkan lembaga yang mengurus kebijakan dan data migrasi penduduk agar manfaat bonus demografi bisa dinikmati semua daerah.

Strategi keempat berhubungan dengan penduduk lanjut usia (lansia). Persentase lansia (60 tahun ke atas) global akan meningkat dari 10 persen (2022) menjadi 16 persen (2050). Sementara proporsi lansia Indonesia tahun 2022 sudah mencapai 10,7 persen, dan akan meningkat hingga 21,90 persen (72,03 juta penduduk) pada 2050.

Suatu negara dikatakan berpenduduk menua (*ageing population*) jika memiliki proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas melampaui 10 persen. Berarti Indonesia sejak 2022 terkategori *ageing population*. Manfaat bonus demografi akan lebih besar jika mampu mempertahankan lansia tetap produktif dan mengurangi beban penduduk usia produktif.

Beberapa negara maju yang mengalami *ageing population* bisa meraih bonus demografi kedua karena mengembangkan *silver economy*, dengan lansia berperan sebagai produsen ataupun konsumen. Bonus demografi sedang terjadi hari ini hingga 18 tahun nanti. Mengutip sebuah ungkapan, *time flies so fast, but we're the pilot*. Menjadi negara maju bukanlah sebatas mimpi.

Nilai Kosmopolit Ibadah Kurban

Abdul Kadir Riyadi

Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya

Hari raya Idul Adha atau juga dikenal dengan Lebaran Haji segera datang. Tampak mulai menjamur di berbagai lokasi, hewan kurban yang dipajang untuk dijual lalu disembelih.

Jual-beli hewan ternak, khususnya kambing dan sapi, mencapai klimaksnya pada musim haji. Tahun lalu, berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian, kebutuhan hewan ternak untuk kurban mencapai 1,72 juta ekor. Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menyebutkan potensi ekonomi kurban ini mencapai Rp 24,3 triliun, dari 2,17 juta orang yang melaksanakan kurban.

Tahun ini dapat diprediksi angka tersebut akan meningkat mengingat kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi yang telah pulih sepenuhnya.

Tampak di permukaan bahwa ibadah kurban lebih dominan pada ritual keagamaan berbasis sosial-ekonomi. Namun, jika diselisi lebih jauh lagi, akan ditemukan sebuah nilai yang lebih esensial, yakni nilai kosmopolit; bahwa umat manusia—termasuk kaum Muslim di dalamnya—adalah bagian dari komunitas besar yang universal.

Kurban sebagai hari raya "universal"

Ibadah kurban tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Agama samawi dan beberapa penganut kepercayaan lokal di Indonesia juga memiliki ibadah

kurban dengan ritual masing-masing.

Bagi umat beragama, kurban hewan ternak atau sesuatu yang lain memiliki dimensi yang lebih dari sekadar "mempersembahkan" sesuatu kepada Tuhan. Kurban memiliki dimensi yang lebih kuat pada hubungan horizontal antarmanusia atau *hablum min al-nas*.

Bahkan, tanpa dikaitkan dengan dimensi spiritual kepada Tuhan sekalipun, memotong hewan ternak untuk kemudian dimasak dan dimakan bersama sudah memiliki nilai sosial yang tinggi dan telah berlangsung selama ribuan tahun peradaban manusia.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Lebaran Haji menjadi salah satu agenda keagamaan umat Islam yang terasa kuat atmosfernya secara nasional. Penjual hewan ternak yang ketiban rezeki tentu tidak berasal dari kalangan umat Islam saja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjelang bulan puasa Maret lalu, Indonesia mengimpor sapi hidup sebanyak 7,8 juta kilogram. Paling banyak berasal dari Australia, lalu sebagian lain dari Brasil, India, Amerika, dan Jepang. Nilai transaksi internasional tersebut tentu bukan angka yang kecil.

Untuk memenuhi kebutuhan akan komoditas daging selama bulan puasa ataupun untuk kurban, Indonesia perlu disokong dengan impor dari be-

berapa negara.

Pada lingkup lebih sempit, daging hari raya kurban dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, terlebih masyarakat kurang mampu. Sebagian warga yang jarang merasakan masak-an olahan daging karena keterbatasan ekonomi dapat merasakan kenikmatannya pada momen ini.

Daging sebagai representasi dari makanan "mewah" pun menjelma menjadi makanan yang merakyat. Apa yang semula sulit dijangkau menjadi mudah didapat, dan sejenak apa yang dikonsumsi masyarakat ketika perayaan kurban menjadi kosmopolit, standar rasa universal.

Nilai kosmopolit ala Sunan Kudus

Bicara tentang ibadah kurban dalam konteks Indonesia, tidak lengkap jika belum menyebut sosok salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada akhir abad ke-15, yakni Sunan Kudus.

Salah satu kebijakan yang terkenal dari sosok Sunan Kudus adalah menghindari menyembelih sapi pada hari raya Idul Adha demi menghormati umat Hindu ketika itu.

Kebijakan tersebut lebih dari bentuk toleransi antarumat beragama. Semangat kurban yang memiliki nilai kosmopolit pada pembahasan sebelumnya diaplikasikan secara membumi oleh Sunan Kudus.

Sunan Kudus dikenal sebagai sosok yang sangat tegas me-

negakkan syariat Islam. Tentu sah saja jika sejak awal Sunan Kudus melakukan kurban dengan menyembelih hewan sapi, sebab sebagai bagian dari masyarakat Jawa pada masa itu, umat Hindu juga memahami perbedaan ajaran Hindu dengan Islam terhadap sapi.

Akan mencederai ajaran Hindu itu sendiri jika seandainya umat Hindu memaksakan penghormatan terhadap sapi kepada masyarakat Jawa.

Pulau Jawa sudah memiliki masyarakat yang sangat majemuk sejak lama. Saling menghormati sudah menjadi urat nadi masyarakatnya sehingga apa yang menjadi perbedaan umat Hindu dan Islam terkait sapi tidak pernah melahirkan pergesekan. Alih-alih menyembelih sapi, Sunan Kudus memilih menganjurkan kerbau untuk disembelih.

Umat Islam adalah bagian dari warga Jawa secara sempit, dan bagian dari masyarakat dunia secara luas. Standar moral yang terkandung dalam kosmopolitanisme itu berlaku secara universal.

Jika Islam ingin dianggap sebagai bagian dari moral universal ini, sudah pasti harus menghindari pilihan syariat yang berpotensi bergesekan dengan kelompok sosial di luar Islam.

Apa yang telah dilakukan Sunan Kudus lebih dari sebuah strategi dakwah. Sejak awal, kurban selalu berisi kebebasan, yakni bisa memilih menyembelih unta, sapi, kerbau, kam-

bing, atau domba. Digantinya sapi dengan kerbau menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengabaikan realitas sosial di sekelilingnya.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Peran orangtua mengasuh anak tak tergantung.
Bukan peran gawai yang tak terganti, lho, ya.

Polri temukan indikasi pengaturan skor Liga.
Kalau mau sepak bola sehat, sikit!

Proyek strategis nasional akan dikaji ulang.
Kajian ulang itu proyek strategis baru, lo.

Mang Weil